



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI
Jl. Raya Pati – Kudus KM. 7 Nomor 1 Pati 59163
Telepon (0295) 386278, Laman: www.kanimpati.kemenkumham.go.id

Nomor : W13.IMI.6-PR.05.04-0070 05 Januari 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021
Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
di Semarang

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor : W.13-PR.05.04-193 tanggal 27 Desember 2021 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Tahun 2021, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, (data terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Hasanin
NIP 197212281993031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati
Tahun 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati ini dengan baik. Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan deskripsi dan paparan atas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati pada tahun 2021.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati ini menjelaskan tentang rencana dan capaian kinerja serta penyerapan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati ini kami sampaikan, semoga laporan ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan pimpinan untuk meningkatkan strategi dan target kinerja pada tahun 2021. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



Pati, 5 Januari 2022

Kepala Kantor

Hasanin

NIP. 197212281993031002



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar belakang.....	1
b. Tugas dan fungsi.....	2
c. Struktur organisasi.....	5
d. Isu strategis / permasalahan.....	8
BAB II PERENCANAAN /PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA.....	9
a. Perencanaan kinerja.....	9
b. Perjanjian kinerja.....	10
c. Target tahun 2021.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
a. Capaian Kinerja.....	16
b. Analisis Capaian Kinerja.....	18
c. Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV PENUTUP.....	23
Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Unsur Instansi Pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018, Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah dokumen yang berisi gambar perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati tahun 2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati



dituntut selalu melakukan peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.

Tugas dan fungsi :

➤ Dibidang Fasilitatif :

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, informasi, dan hubungan masyarakat, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

➤ Dibidang Substantif

1. Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan.

Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan, verifikasi, dan adjudikasi dokumen perjalanan;
- b. pelayanan paspor; dan
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan terdiri atas:

- (1) Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.
 - (2) Subseksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan adjudikasi penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.
2. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- b. pelayanan izin tinggal;
- c. pelayanan izin masuk kembali;
- d. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:

- (1) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.
- (2) Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat



keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:

- (1) Subseksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
 - (2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.
4. Seksi Intelijen dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

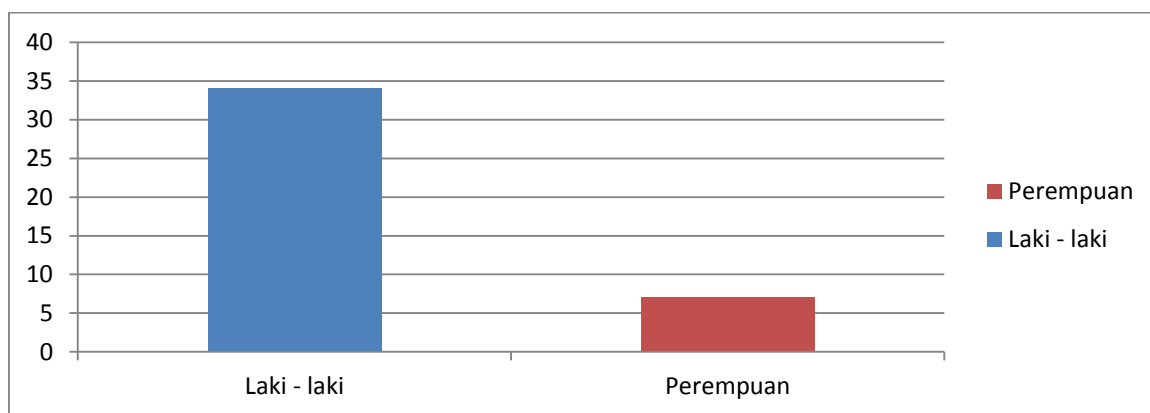
- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Berdasarkan data sistem kepegawaian (SIMPEG) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati terdapat 41 pegawai. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, berdasarkan gender, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

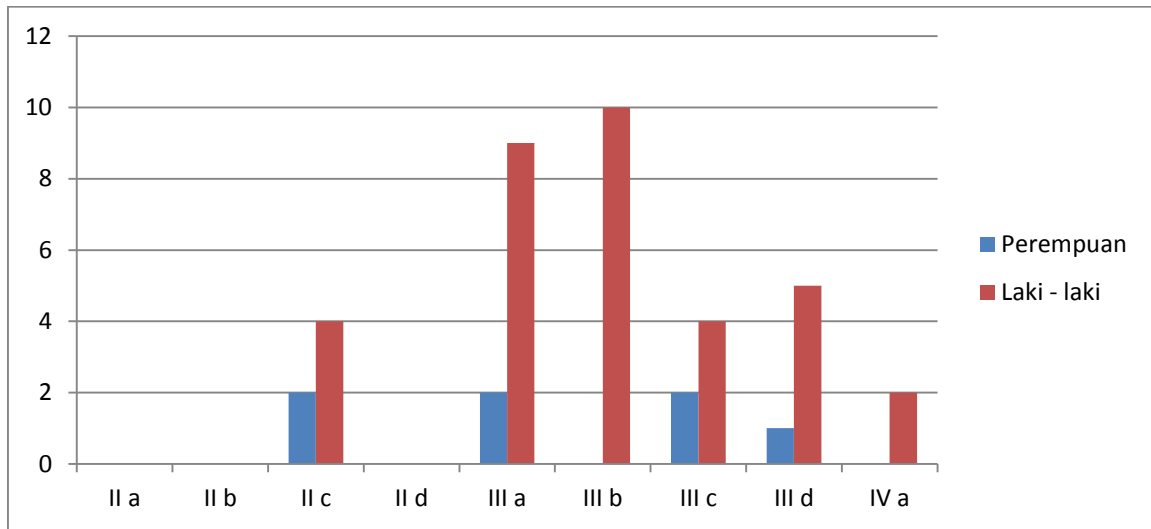
1. Berdasarkan Gender

Laki – laki	34
Perempuan	7
Jumlah	41



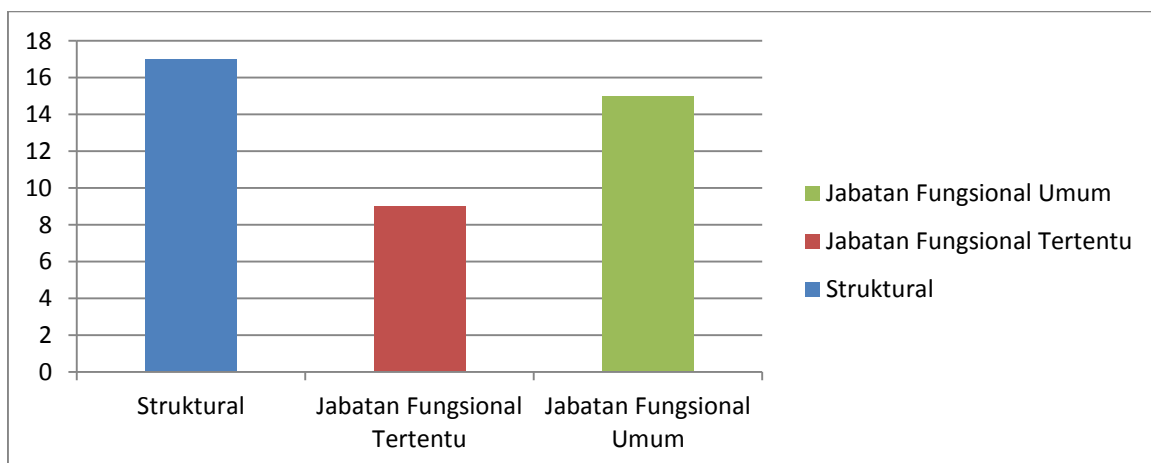
2. Berdasarkan golongan :

Golongan	Perempuan	Laki - laki
II a	0	0
II b	0	0
II c	2	4
II d	0	0
III a	2	9
III b	0	10
III c	2	4
III d	1	5
IV a	0	2
Jumlah	7	34



3. Berdasarkan Jabatan :

Jabatan	Jumlah
Struktural	17
Jabatan Fungsional Tertentu	9
Jabatan Fungsional Umum	15
Total	41





D. ISU STRATAEGIS / PERMASALAHAN

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai Pelaksana
2. Kurangnya perangkat komputer yang memadai dan terbaru
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mencapai kualitas pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi
4. Sarana dan Prasarana yang belum mencukupi karena adanya kenaikan kelas I
5. Tidak terlaksananya pengawasan dengan maksimal dikarenakan adanya virus Covid -19



BAB II

PERENCANAAN /PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem inline. Dengan demikian seluruh satuan kerja harus mendukung pencapaian sasaran kinerja unit eselon 1 (IKU).

Berdasarkan DIPA petikan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Nomor SP DIPA-013.06.2.652344/2021 tanggal 23 November 2020, sasaran program / IKU Direktorat Keimigrasian diturunkan menjadi sasaran kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan sebagai acuan pengukuran dan pengendalian pelaksanaan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati telah membuat rencana strategis yang dituangkan dalam Visi, Misi dan Motto.

Visi : Masyarakat memperoleh kapasitas hukum.

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia.

Motto : Melayani dengan tulus.

Janji layanan : Kepastian persyaratan, Kepastian biaya, dan Kapasitas Waktu Penyelesaian.



B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah
2. Program Dukungan Manajemen
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanin
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah



A. Yuspahruddin
NIP. 198209202000121001



Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati



Hasanin
NIP. 197212281993031002





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		Rp. 1.738.019.000,-	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		Rp. 1.738.019.000,-	
Program Dukungan Manajemen		Rp. 4.899.559.000,-	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi		Rp. 4.899.559.000,-	

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah



A. Yuspahruddin
NIP. 198209202000121001



Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati



Masanin
NIP. 197212281993031002





C. TARGET TAHUNAN

TARGET TAHUN 2021 KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
		2021
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	4 kegiatan
	Layanan Penerbitan Paspor	35.223 Orang
	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	812 Orang
	Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah	24 Operasi
	Operasi Mandiri di Wilayah	4 Operasi
	Operasi Gabungan di Wilayah	2 Operasi
	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi
	Tindakan Administratif Keimigrasian	2 Orang
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Layanan Perkantoran	1 Layanan
	Layanan Program dan Anggaran UPT	1 Layanan
	Layanan Manajemen Keuangan UPT	1 Layanan
	Layanan Kerumah tanggaan UPT	1 Layanan
	Sarana Internal UPT	1 Unit
	Layanan Manajemen Kepegawaian UPT	39 Orang
	Layanan Reformasi Birokrasi	1 Layanan
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	1 Laporan

Jumlah Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sebesar : Rp. 6.934.578.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2021 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2021 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2021		(%)
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	4 kegiatan	3 Kegiatan	75 %
	Layanan Penerbitan Paspur	35.223 Orang	5002 Orang	14%
	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	812 Orang	982 Orang	120%
	Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah	24 Operasi	11 Operasi	45,83%
	Operasi Mandiri di Wilayah	4 Operasi	20 Operasi	500%
	Operasi Gabungan di Wilayah	2 Operasi	3 Operasi	150%
	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	1 Operasi	100%
	Tindakan Administratif Keimigrasian	2 Orang	3 Orang	150%
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Layanan Program dan Anggaran UPT	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Layanan Manajemen Keuangan UPT	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Layanan Kerumah tanggaan UPT	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Sarana Internal UPT	1 Unit	1 Unit	100%
	Layanan Manajemen Kepegawaian UPT	39 Orang	41 orang	105%
	Layanan Reformasi Birokrasi	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	1 Laporan	1 Laporan	100%

Capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas Non TPI Pati tahun 2021 diantaranya juga terealisasi melalui inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan pembuatan dokumen keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas Non TPI Pati tahun 2021 diantaranya :



1. Pengambilan Paspor Drive Thru

Merupakan inovasi layanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19. Pemohon tidak perlu turun dari kendaraannya saat pengambilan paspor, cukup menginputkan nomor permohonan/scan QR Code nomor permohonan pada mesin check-in drive thru kemudian menuju loket drive thru untuk pengambilan paspornya.

Adanya pengambilan paspor secara drive thru dapat mempercepat proses layanan pengambilan paspor dari sebelumnya membutuhkan waktu rata-rata 15 menit menjadi rata-rata 5 menit. Pengambilan paspor drive thru juga dapat meminimalkan timbulnya kerumunan karena antrian, dan dapat meminimalkan kontak/interaksi baik antara pemohon dengan pemohon lainnya maupun antara pemohon dengan petugas.

2. WISMA (Whatsapp Siap Melayani Anda)

WISMA adalah Whatsapp Gateway pada kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati yang akan memberikan informasi secara otomatis terkait informasi keimigrasian seperti tatacara, persyaratan, harga dan status permohonan pembuatan paspor. Selain itu WISMA juga digunakan sebagai kanal pengaduan masyarakat melalui Whatsapp. Dengan adanya WISMA, masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi keimigrasian khususnya dalam pembuatan paspor. Pemohon hanya perlu mengirimkan teks sesuai format yang ditentukan dan segera mendapatkan informasi balasan dari WISMA. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, terdapat penambahan fitur layanan pada WISMA, yaitu bagi pemohon yang sebelumnya melakukan pengecekan status permohonannya namun masih dalam proses, saat paspor sudah selesai dan siap untuk diambil, pemohon tersebut akan secara otomatis mendapatkan notifikasi dari WISMA bahwa paspor siap untuk diambil tanpa perlu menanyakan ulang melalui WISMA.

3. Sip Jempol (Imigrasi Pati Jemput Bola)

Sip Jempol Yaitu Inovasi pada Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, yang mulai dilaksanakan pada bulan September 2021. Sistem pendaftaran pemohon pada program Sip Jempol dengan cara WALK IN (tidak online). Kegiatan Sip Jempol di khususkan pada kabupaten-kabupaten wilayah kerja kanim pati, dan pelaksanaannya dilakukan minimal 2 hari kerja.



Sasaran kegiatan Sip Jempol adalah masyarakat yang tinggal diluar kabupaten Pati (Rembang, Blora, Jepara). Pelaksanaan Sip Jempol di agendakan setiap bulan di setiap dengan tempat bergantian, jadi dalam 1 tahun setiap kabupaten dapat 4 kali kesempatan pelaksanaan Sip Jempol.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1. Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah

Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati terkait koordinasi pengawasan orang asing di wilayah dengan indikator jumlah kegiatan rapat timpora telah terlaksana kurang dari 100% atau terealisasi sebanyak 3 Kegiatan Rapat Timpora di kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara selama tahun 2021

Target : 4 Kegiatan
Capaian Kinerja : 3 Kegiatan
Persentase Realisasi : $3/4 \times 100\% = 75\%$

2. Layanan Penerbitan Paspor

Capaian Kinerja Terkait layanan penerbitan paspor dengan indikator jumlah orang terlaksana kurang dari 100% atau realisasi sebanyak 5002 orang selama tahun 2021 dikarenakan adanya wabah virus Covid 19.

Target : 35223 orang
Capaian Kinerja : 5002 Kegiatan
Persentase Realisasi : $5002/35223 \times 100\% = 14\%$

3. Layanan Penerbitan Izin Tinggal

Capaian Kinerja Terkait layanan penerbitan Izin Tinggal dengan indikator jumlah orang terlaksana lebih dari 100% atau realisasi sebanyak 982 orang selama tahun 2021.

Target : 812 orang
Capaian Kinerja : 982 Kegiatan
Persentase Realisasi : $982/812 \times 100\% = 120\%$

4. Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah

Capaian Kinerja terkait penyidikan intelijen keimigrasian di wilayah dengan indikator jumlah operasi terlaksana kurang dari 100% atau realisasi sebanyak 11 operasi selama tahun 2021.



Target : 24 operasi
Capaian Kinerja : 11 operasi
Persentase Realisasi : $11/24 \times 100\% = 45,83\%$

5. Operasi Mandiri di Wilayah

Capaian kinerja terkait operasi mandiri di wilayah dengan indikator jumlah operasi terlaksana lebih dari 100% atau realisasi sebanyak 20 operasi selama tahun 2021.

Target : 4 operasi
Capaian Kinerja : 20 operasi
Persentase Realisasi : $20/4 \times 100\% = 500\%$

6. Operasi Gabungan di Wilayah

Capaian kinerja terkait operasi gabungan di wilayah dengan indikator jumlah operasi terlaksana lebih dari 100% atau realisasi sebanyak 3 operasi selama tahun 2021.

Target : 2 operasi
Capaian Kinerja : 3 operasi
Persentase Realisasi : $3/2 \times 100\% = 150\%$

7. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah

Capaian kinerja terkait penyidikan tindak pidana keimigrasian di wilayah dengan indikator jumlah orang terlaksana 100% atau realisasi sebanyak 1 operasi selama tahun 2021.

Target : 1 operasi
Capaian Kinerja : 1 operasi
Persentase Realisasi : $1/1 \times 100\% = 100\%$

8. Tindakan Administratif Keimigrasian

Capaian kinerja terkait tindakan administrasi keimigrasian dengan indikator jumlah orang terlaksana lebih dari 100% atau realisasi sebanyak 3 orang selama tahun 2021.

Target : 2 orang
Capaian Kinerja : 3 orang
Persentase Realisasi : $3/2 \times 100\% = 150\%$

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi

1. Layanan Perkantoran

Sasaran strategis berupa terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan



bangunan, pemeliharaan perlengkapan dan sarana perkantoran, pemeliharaan kendaraan dinas, honorarium pengelola keuangan dan sewa kendaraan operasional masing-masing terlaksana 1 kegiatan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

Target : 1 Layanan
Capaian Kinerja : 1 Layanan
Persentase Realisasi : $1/1 \times 100\% = 100\%$

2. Layanan Program dan Anggaran UPT

Capaian kinerja terkait layanan program dan anggaran UPT dengan indikator jumlah layanan terlaksana 100% atau realisasi sebanyak 1 layanan berupa Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2022.

Target : 1 Layanan
Capaian Kinerja : 1 Layanan
Persentase Realisasi : $1/1 \times 100\% = 100\%$

3. Layanan Manajemen Keuangan UPT

Capaian kinerja terkait layanan Manajemen Keuangan UPT dengan indikator jumlah layanan terlaksana 100% atau realisasi sebanyak 1 layanan

Target : 1 Layanan
Capaian Kinerja : 1 Layanan
Persentase Realisasi : $1/1 \times 100\% = 100\%$

4. Layanan Kerumah tanggaan UPT

Capaian kinerja terkait layanan kerumah tanggaan UPT dengan indikator jumlah layanan terlaksana 100% atau realisasi sebanyak 1 layanan berupa pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan serta pencegahan dan penanganan covid-19

Target : 1 Layanan
Capaian Kinerja : 1 Layanan
Persentase Realisasi : $1/1 \times 100\% = 100\%$

5. Sarana Internal UPT

Capaian kinerja terkait sarana internal UPT dengan indikator jumlah unit terlaksana 100% atau realisasi sebanyak 1 unit berupa pembelian 1 (satu) Unit AC

Target : 1 unit
Capaian Kinerja : 1 unit
Persentase Realisasi : $1/1 \times 100\% = 100\%$



6. Layanan Manajemen Kepegawaian UPT

Capaian kinerja terkait layanan manajemen kepegawaian UPT dengan indikator jumlah orang terlaksana lebih dari 100% atau realisasi sebanyak 41 orang sebab di tahun 2021 jumlah pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sejumlah 41 orang.

Kegiatan yang terlaksana diantaranya :

- a. kegiatan pembinaan mental seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati pada tanggal 29 Maret 2021;
- b. Kegiatan Pembinaan SDM (Siraman Rohani) pada tanggal 10 Desember 2021
- c. Kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi Bidang Fasilitatif pada tanggal 10 Desember 2021

Target : 39 orang

Capaian Kinerja : 41 orang

Persentase Realisasi : $41/39 \times 100\% = 105\%$

7. Layanan Reformasi Birokrasi

Capaian kinerja terkait layanan reformasi birokrasi dengan indikator jumlah layanan terlaksana 100% atau realisasi sebanyak 1 layanan diantaranya :

- a. Kegiatan Asesmen Seleksi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2022 pada tanggal 9 November 2021;
- b. Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Reformasi Birokrasi Tangggal 16 Desember 2021;

Target : 1 Layanan

Capaian Kinerja : 1 Layanan

Persentase Realisasi : $1/1 \times 100\% = 100\%$

8. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT

Capaian kinerja terkait monitoring dan evaluasi Kinerja program dan kegiatan UPT dengan indikator jumlah layanan terlaksana 100% atau realisasi sebanyak 1 layanan berupa Konferensi Pers Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Tahun 2021 pada tanggal 7 Desember 2021.

Target : 1 Layanan

Capaian Kinerja : 1 Layanan

Persentase Realisasi : $1/1 \times 100\% = 100\%$



C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 6.611.887.326,00 atau sebesar 95 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 6.934.578.000,00 yang terbagi dalam 16 Kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
		Pagu		
1.	Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	199.295.000	120.161.900	60%
2.	Layanan Penerbitan Paspor	1.027.060.000	1.009.005.848	98%
3.	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	74.159.000	73.744.249	99%
4.	Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah	126.893.000	118.434.000	93%
5.	Operasi Mandiri di Wilayah	110.760.000	106.729.800	96%
6.	Operasi Gabungan di Wilayah	96.452.000	96.201.500	99%
7.	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	15.920.000	4.439.964	27%
8.	Tindakan Administratif Keimigrasian	87.480.000	21.095.257	24%
9.	Layanan Perkantoran	4.451.480.000	4.357.841.747	97%
10.	Layanan Program dan Anggaran UPT	200.000	-	0%
11.	Layanan Manajemen Keuangan UPT	8.810.000	4.585.000	52%
12.	Layanan Kerumah tanggaan UPT	588.282.000	574.331.311	97%
13.	Sarana Internal UPT	20.000.000	19.790.000	98%
14.	Layanan Manajemen Kepegawaian UPT	107.140.000	99.437.750	92%
15.	Layanan Reformasi Birokrasi	18.580.000	5.189.000	27%
16.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	2.067.000	900.000	43%
	Jumlah	6.934.578.000	6.611.887.326	95%



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Aktualisasi Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi. LKIP ini diharapkan berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

Pada keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati telah berupaya melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan ditengah situasi pandemi virus covid 19. Pencapaian kinerja pada program - program tertentu menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai yang telah diharapkan. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang diinginkan karena terkendala situasi dan kondisi saat ini yang sedang mengalami Pandemi Virus Covid 19 ditengah – tengah masyarakat yang juga berimbas pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sehingga terdapat beberapa kegiatan yang kurang maksimal untuk dilakukan namun Kegiatan yang belum dapat direalisasikan akan dijadikan prioritas kegiatan tahun berikutnya yang menutupi kekurangan atau kesenjangan antar target dan pencapaian kinerja tersebut.

Mengacu pada permasalahan yang terjadi di tahun 2021 tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan masyarakat, keamanan/penegakan hukum serta fasilitator pembangunan ekonomi. LKIP tahun 2021 ini diharapkan selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat baik untuk penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

Kiranya LKIP tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, LKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implemementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), dan Rencana Anggaran (Financial Plan) pada masa-masa mendatang.

Pati, 05 Januari 2022

Kepala Kantor



Rasanin

NIP. 197212281993031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanin

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahrudin

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

A. Yuspahrudin
NIP. 198209202000121001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati



Hasanin
NIP. 197212281993031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%

Kegiatan	Anggaran
----------	----------

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		Rp. 1.738.019.000,-	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		Rp. 1.738.019.000,-	
Program Dukungan Manajemen		Rp. 4.899.559.000,-	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi		Rp. 4.899.559.000,-	

Semarang, 10 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

A. Yuspahrudin
NIP. 198209202000121001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati



Hasanin
NIP. 197212281993031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanin

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 10 Maret 2021

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati



Hasanin

NIP. 197212281993031002



PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	013-652344	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI	097	PAGU	2,760,130,000	4,154,448,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	6,934,578,000	
				REALISASI	2,667,513,456	3,924,583,667	19,790,000							6,611,887,123	
				PERSENTASE	(96.64%)	(94.47%)	(98.95%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(95.35%)	
				SISA	92,616,544	229,864,333	210,000	0	0	0	0	0	0	322,690,877	
TOTAL				PAGU	2,760,130,000	4,154,448,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	6,934,578,000	
				REALISASI	2,667,513,456	3,924,583,667	19,790,000								6,611,887,123
				PERSENTASE	(96.64%)	(94.47%)	(98.95%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(95.35%)
				SISA	92,616,544	229,864,333	210,000	0	0	0	0	0	322,690,877		

**LAPORAN REALISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI**

Bulan : Desember

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.738.019.000	1.549.812.518	188.206.482
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum	1.738.019.000	1.549.812.518	188.206.482
5254.AEA	Koordinasi	199.295.000	120.161.900	79.133.100
5254.AEA.001	Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	199.295.000	120.161.900	79.133.100
051	Koordinasi Tim PORA	199.295.000	120.161.900	79.133.100
A	<u>Penyusunan Materi</u>	37.140.000	36.021.900	1.118.100
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	37.140.000	36.021.900	1.118.100
B	<u>Koordinasi dan Pembahasan</u>	162.155.000	84.140.000	78.015.000
521213	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Honor Output Kegiatan	43.000.000	19.500.000	23.500.000
524111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.080.000	15.630.000	43.450.000
524113	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.000.000	19.050.000	7.950.000
524119	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	33.075.000	29.960.000	3.115.000
5254.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.101.219.000	1.082.750.097	18.468.903
5254.BAA.001	Layanan Penerbitan Paspor	1.027.060.000	1.009.005.848	18.054.152
051	Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Kantor Imigrasi	156.190.000	152.919.977	3.270.023
A	<u>Penerbitan Dokumen Perjalan RI</u>	156.190.000	152.919.977	3.270.023
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	60.000.000	58.338.966	1.661.034
521811	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33.000.000	33.000.000	0
522141	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Sewa	1.500.000	510.000	990.000
524111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.940.000	57.921.011	18.989
524113	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000	3.150.000	600.000
054	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	870.870.000	856.085.871	14.784.129
A	<u>Penyebaran Informasi</u>	359.523.000	355.602.700	3.920.300
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	77.653.000	77.618.250	34.750
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	163.800.000	163.725.050	74.950
522151	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Jasa Profesi	2.000.000	2.000.000	0
524111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.420.000	42.374.400	45.600
524113	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.550.000	26.850.000	2.700.000
524119	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	44.100.000	43.035.000	1.065.000
B	<u>Pengelolaan Website, Fasilitas Indeks Kepuasan, SMS Gateway, dan</u>	58.600.000	58.540.823	59.177
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	58.600.000	58.540.823	59.177
C	<u>Kerjasama Antar Instansi</u>	269.247.000	261.142.931	8.104.069
524111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	267.747.000	259.792.931	7.954.069
524113	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.350.000	150.000
D	<u>Pemeliharaan Kesisteman</u>	183.500.000	180.799.417	2.700.583
521811	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	124.500.000	122.540.000	1.960.000
523121	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.000.000	58.259.417	740.583
5254.BAA.002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	74.159.000	73.744.249	414.751
051	Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi	74.159.000	73.744.249	414.751
A	<u>Penerbitan Izin Tinggal</u>	74.159.000	73.744.249	414.751
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	16.869.000	16.480.320	388.680
521811	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.700.000	2.679.600	20.400
524111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.590.000	54.584.329	5.671
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	350.025.000	325.805.264	24.219.736
5254.BHB.U01	Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah	126.893.000	118.434.000	8.459.000
051	Pengumpulan Data dan Informasi	126.643.000	118.434.000	8.209.000
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	126.643.000	118.434.000	8.209.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	126.643.000	118.434.000	8.209.000
052	Penyajian Laporan	250.000	0	250.000
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	250.000	0	250.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	250.000	0	250.000
5254.BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah	110.760.000	106.729.800	4.030.200
051	Pelaksanaan Pengawasan	110.510.000	106.729.800	3.780.200
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	110.510.000	106.729.800	3.780.200
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	110.510.000	106.729.800	3.780.200
052	Penyusunan Laporan dan Evaluasi	250.000	0	250.000
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	250.000	0	250.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	250.000	0	250.000
5254.BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah	96.452.000	96.201.500	250.500
052	Pelaksanaan Pengawasan	96.202.000	96.201.500	500
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	96.202.000	96.201.500	500
521213	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Honor Output Kegiatan	12.950.000	12.950.000	0
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	83.252.000	83.251.500	500
053	Penyusunan Laporan dan Evaluasi	250.000	0	250.000
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	250.000	0	250.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	250.000	0	250.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
5254.BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	15.920.000	4.439.964	11.480.036
051	Penyelidikan	7.400.000	4.439.964	2.960.036
A	TANPA SUB KOMPONEN	7.400.000	4.439.964	2.960.036
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.000.000	4.439.964	1.560.036
522151	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Jasa Profesi	1.400.000	0	1.400.000
052	Penyidikan	8.520.000	0	8.520.000
A	Permulaan	765.000	0	765.000
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	265.000	0	265.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	500.000	0	500.000
B	Olah TKP	1.800.000	0	1.800.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000.000	0	1.000.000
522151	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Jasa Profesi	800.000	0	800.000
C	Upaya Paksa	2.500.000	0	2.500.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.500.000	0	2.500.000
D	Pemeriksaan	1.955.000	0	1.955.000
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	455.000	0	455.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	0	1.500.000
E	Penyerahan Berkas Perkara	1.000.000	0	1.000.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000.000	0	1.000.000
F	Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti	500.000	0	500.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	500.000	0	500.000
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	87.480.000	21.095.257	66.384.743
5254.BIB.001	Tindakan Administratif Keimigrasian	87.480.000	21.095.257	66.384.743
051	Pendetensian	17.680.000	0	17.680.000
A	Penjagaan dan Pengawasan	6.560.000	0	6.560.000
522191	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Jasa Lainnya	1.200.000	0	1.200.000
524111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.360.000	0	5.360.000
B	Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni	9.870.000	0	9.870.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9.870.000	0	9.870.000
C	Perawatan Deteni	1.250.000	0	1.250.000
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.250.000	0	1.250.000
052	Pendeportasian	69.800.000	21.095.257	48.704.743
A	TANPA SUB KOMPONEN	69.800.000	21.095.257	48.704.743
524111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.800.000	21.095.257	48.704.743
WA	Program Dukungan Manajemen	5.196.559.000	5.062.074.808	134.484.192
6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	5.196.559.000	5.062.074.808	134.484.192
6232.EAA	Layanan Perkantoran	4.451.480.000	4.357.841.747	93.638.253
6232.EAA.994	Layanan Perkantoran	4.451.480.000	4.357.841.747	93.638.253
001	Gaji dan Tunjangan	2.760.130.000	2.667.513.658	92.616.342
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	2.760.130.000	2.667.513.658	92.616.342
511111	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Gaji Pokok PNS	1.894.525.000	1.831.048.200	63.476.800
511119	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.000	33.648	6.352
511121	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	142.084.000	140.039.550	2.044.450
511122	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Tunj. Anak PNS	36.975.000	36.923.860	51.140
511123	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Tunj. Struktural PNS	105.520.000	105.520.000	0
511124	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Tunj. Fungsional PNS	64.910.000	64.620.000	290.000
511125	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Tunj. PPh PNS	1.117.000	1.052.860	64.140
511126	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Tunj. Beras PNS	116.307.000	114.930.540	1.376.460
511129	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Uang Makan PNS	354.828.000	329.900.000	24.928.000
511151	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Tunjangan Umum PNS	43.824.000	43.445.000	379.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.691.350.000	1.690.328.089	1.021.911
A	Operasional Perkantoran	670.476.000	670.392.644	83.356
521111	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Keperluan Perkantoran	624.850.000	624.849.654	346
521811	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45.626.000	45.542.990	83.010
B	Langganan Daya dan Jasa	151.510.000	150.685.900	824.100
521114	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.100.000	478.500	621.500
522111	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Langganan Listrik	148.245.000	148.241.512	3.488
522112	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Langganan Telepon	2.165.000	1.965.888	199.112
E	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	438.231.000	438.174.370	56.630
523111	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	377.689.000	377.689.000	0
523112	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	60.542.000	60.485.370	56.630
F	Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran	86.145.000	86.133.801	11.199
523121	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.145.000	86.133.801	11.199
G	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	89.100.000	89.053.374	46.626
523121	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.100.000	89.053.374	46.626
H	Honorarium Pengelola Keuangan	108.360.000	108.360.000	0
521115	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	108.360.000	108.360.000	0
I	Sewa Kendaraan Operasional	147.528.000	147.528.000	0
521119	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Barang Operasional Lainnya	15.000.000	15.000.000	0
522141	[00000000-A-0-0-097-03-09] Belanja Sewa	132.528.000	132.528.000	0
6232.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9.010.000	4.585.000	4.425.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
6232.EAB.001	Layanan Program dan Anggaran UPT	200.000	0	200.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	200.000	0	200.000
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	200.000	0	200.000
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	200.000	0	200.000
6232.EAB.002	Layanan Manajemen Keuangan UPT	8.810.000	4.585.000	4.225.000
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	8.810.000	4.585.000	4.225.000
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	8.810.000	4.585.000	4.225.000
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	5.210.000	1.785.000	3.425.000
522151	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Jasa Profesi	3.600.000	2.800.000	800.000
6232.EAC	Layanan Umum	588.282.000	574.331.311	13.950.689
6232.EAC.001	Layanan Kerumahtanggaan UPT	588.282.000	574.331.311	13.950.689
051	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	588.282.000	574.331.311	13.950.689
A	<u>Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan</u>	282.632.000	276.314.230	6.317.770
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	39.917.000	35.453.531	4.463.469
521213	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Honor Output Kegiatan	8.160.000	8.160.000	0
521219	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	72.855.000	72.743.540	111.460
522111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Langganan Listrik	60.000.000	58.822.109	1.177.891
522141	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Sewa	45.000.000	45.000.000	0
523121	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.700.000	56.135.050	564.950
B	<u>Pencegahan dan Penanganan Covid-19</u>	305.650.000	298.017.081	7.632.919
521131	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Operasional - Penanganan	222.600.000	222.519.610	80.390
521841	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Barang Persediaan - Penanganan	33.750.000	33.296.471	453.529
522192	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	49.300.000	42.201.000	7.099.000
6232.EAD	Layanan Sarana Internal	20.000.000	19.790.000	210.000
6232.EAD.951	Sarana Internal UPT	20.000.000	19.790.000	210.000
051	Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi	20.000.000	19.790.000	210.000
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	20.000.000	19.790.000	210.000
532111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	19.790.000	210.000
6232.EAF	Layanan SDM	107.140.000	99.437.750	7.702.250
6232.EAF.001	Layanan Manajemen Kepegawaian UPT	107.140.000	99.437.750	7.702.250
051	Pengelolaan Kepegawaian	107.140.000	99.437.750	7.702.250
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	107.140.000	99.437.750	7.702.250
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	8.480.000	8.160.000	320.000
522151	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Jasa Profesi	5.600.000	5.600.000	0
522191	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Jasa Lainnya	1.800.000	1.460.000	340.000
524111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.660.000	79.856.050	1.803.950
524113	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000	300.000	1.800.000
524114	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	7.500.000	4.061.700	3.438.300
6232.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	18.580.000	5.189.000	13.391.000
6232.EAH.001	Layanan Reformasi Birokrasi	18.580.000	5.189.000	13.391.000
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	18.580.000	5.189.000	13.391.000
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	18.580.000	5.189.000	13.391.000
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	4.240.000	1.589.000	2.651.000
522151	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Jasa Profesi	3.600.000	3.600.000	0
524111	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.740.000	0	10.740.000
6232.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2.067.000	900.000	1.167.000
6232.EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	2.067.000	900.000	1.167.000
051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	2.067.000	900.000	1.167.000
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	2.067.000	900.000	1.167.000
521211	[00000000-D-0-0-097-03-09] Belanja Bahan	2.067.000	900.000	1.167.000